KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Digebukin sana-sini: Pansus KPK cuek bebek
Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Digebukin Sani-sini

Pansus KPK Cuek Bebek

KRITIKAN terhadap Pansus Hak Angket KPK terus berdatangan. Mulai dari aktivis, akademisi, Ormas, sampai musisi, menyampaikan kritikan pedas kepada Pansus. Namun, Pansus cuek saja dengan kritikan itu. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menyatakan, pihaknya akan terus bekerja sampai selesai.

Kemarin, Pansus kedatangan dua organisasi yang menyatakan dukungan ke KPK dan mengkritik kerja Pansus. Dua organisasi itu adalah Pemuda Muhammadiyah dan Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCI). Agun menerima kedatangan dua organisasi itu dengan santai.

Dalam pertemuan itu, Direktur Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Sohardi menyerahkan penolakan lebih dari 45 orang terhadap upaya pelemahan KPK. Penolakan itu didapat dari penggalangan melalui petisi online di situsweb change.org.

"Kami menggalang melalui petisi online yang saya buka sejak Saudara Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) mengetuk palu menyetujui Hak Angket. Suara ini tidak lebih banyak dari suara Bapak-bapak yang didapat dari Pemilu. Ini suara kecil, 45.111 ribu suara yang menyatakan penolakan terhadap Hak Angket," ucapnya sambil menyerahkan penolakan itu.

Agun pun menerima secara simbolis penolakan tersebut. "Kami menampung aspirasi dari semua elemen masyarakat," ucapnya.

Namun, pihaknya memastikan, kerja Pansus tidak bisa dihentikan. Alasannya, pembentukan Pansus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia pun memastikan, Pansus tidak akan memperlemah KPK. "Tidak ada niat untuk melemahkan. Semangatnya menjaga cita-cita reformasi. Pansus dipastikan bergerak sesuai koridor hukum yang berlaku," ucap Agun.

Perwakilan APCI Tubagus Tirtayasa sangsi Pansus KPK menyelesaikan tugasnya. Menurut Tirta, berkaca dari sejumlah Pansus yang telah dilakukan DPR, berakhir tanpa kejelasan. "Kami juga melihat ada kepentingan yang dipolitisir dalam Angket ini," katanya.

Untuk hindari upaya politisasi dalam Pansus Hak Angket KPK, dia pun menantang Agun cs membuat surat pernyataan tertulis yang menjamin bahwa setiap anggota Pansus bebas dari kejahatan korupsi.

"Kami perlu pernyataan bahwa anggota kalian (Pansus) tidak satu pun terlibat korupsi," tantangnya.

Tirta mengatakan, kepercayaan dirinya dan masyarakat kepada DPR sudah hampir tidak ada. Karena itu, jangan sampai upaya penyelidikan KPK oleh DPR dilakukan oleh orang-orang yang terlibat kasus korupsi.

Agun tidak mengiyakan tantangan itu. Dia hanya menepis tudingan yang menyebut Pansus ingin menganggu dan menghalangi proses pemberantasan korupsi. Menurutnya, semua kinerja yang dilakukan Pansus hanya dalam rangka pengawasan. Dia pun memastikan Pansus mendukung semua tugas pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. ■ KAL